

Judul : Wiranto: Tunda Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah
Tanggal : Selasa, 13 Maret 2018
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 5

Wiranto: Tunda Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah

Jakarta, Pelita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Dia menegaskan permintaan penundaan dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

"Risiko dengan dia (calon kepala daerah—Red) dipanggil se-

bagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK, berpengaruh pada perolehan suara. Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," tutur Wiranto.

Menko Polhukam menambahkan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh Lembaga Antirasuah itu, juga dapat berimbas ke ranah politik. "Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai-par-

tai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, jika ingin mengumumkan calon kepala daerah yang tersangka, KPK seharusnya melakukan hal tersebut sebelum kandidat ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sehingga tidak merugikan banyak pihak. "Jadi, tidak berlebihan permintaan dari penyelenggara pemilu, yaitu tunda dahulu ini. Nanti, setelah (Pilkada 2018) itu silakan dilanjutkan (proses hukumnya)," kata Wiranto seperti dikutip Antara.

Sementara itu pimpinan DPR RI bersama KPK kemarin membahas strategi soal pencegahan terhadap korupsi yang masif diakibatkan oleh pelaksanaan Pilkada Serentak.

"Ya, tadi kami tidak bicara

teknis. Tidak bicara kasus. Tetapi lebih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi yang masif terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, "Kami memberikan masukan berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudratnya dari pada manfaatnya."

Ia menambahkan untuk maju sebagai Kepala Daerah membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga pada ujungnya melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah karena untuk maju seb-

agai Kepala Daerah itu sangat dibutuhkan biaya yang sangat tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi," kata Bamsoet.

DPR pun kata dia, meminta KPK untuk melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat bahwa Pilkada Serentak itu lebih banyak mudratnya.

Terkait hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaga akan melakukan kajian kembali dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Tadi juga Pak Syamsudin Haris dari LIPi juga datang, nanti kami undang lah banyak ahli banyak pakar kami undang, untung ruginya baik buruknya apakah Pilkada Langsung apakah Pilkada Keterwakilan seperti yang lalu," ungkap Agus. (did)